

**BINGKAI ISLAM DALAM DEMOKRATISASI
DI INDONESIA**

**(Telaah Atas Pemikiran Kuntowijoyo
Tentang Hubungan antara Islam dengan Negara)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Menenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam

Oleh:

ALVA AGUS WIDODO
NIM. 00520303

**JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Dr. H. SISWANTO MASRURI, M.A.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 8 Agustus 2005

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Alva Agus Widodo
NIM : 00520303
Jurusan : Perbandingan Agama
Judul Skripsi : **"Bingkai Islam dalam Demokratisasi di Indonesia
(Telaah Atas Pemikiran Kuntowijoyo tentang Hubungan
antara Islam dengan Negara)"**

Maka selaku Pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing,



Dr. Siswanto Masruri, M.A.
NIP. 150 216 528

Drs. RAHMAT FAJRI, M. Ag.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 8 Agustus 2005

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Alva Agus Widodo
NIM : 00520303
Jurusan : Perbandingan Agama
Judul Skripsi : **"Bingkai Islam dalam Demokratisasi di Indonesia
(Telaah Atas Pemikiran Kuntowijoyo tentang Hubungan
antara Islam dengan Negara)"**

Maka selaku Pembantu Pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.-

Pembantu Pembimbing,



Drs. Rahmat Fajri, M. Ag.
NIP. 150 275 041



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/1269/2005

Skripsi dengan judul : *Bingkai Islam Dalam Demokratisasi di Indonesia (Telaah atas Pemikiran Kuntowijoyo tentang Hubungan antara Islam dengan Negara)*


Diajukan oleh :

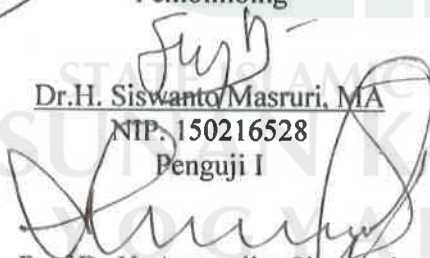
1. Nama : Alva Agus Widodo
2. NIM : 00520303
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : PA

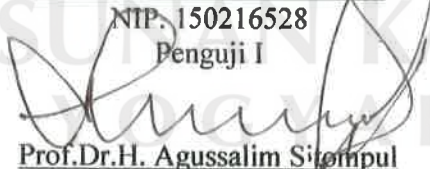
Telah dimunaqosyahkan pada hari : Kamis, tanggal : 15 September 2005 dengan nilai : 88 (A-) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

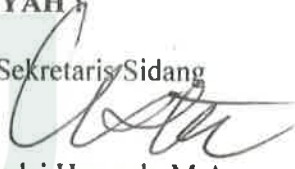
Ketua Sidang



Drs. H. Muzairi, MA
NIP. 150215586
Pembimbing

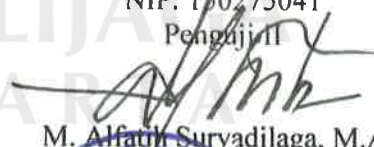

Dr. H. Siswanto Masruri, MA
NIP. 150216528
Penguji I


Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul
NIP. 150169820

Sekretaris Sidang


Ustadzi Hamzah, M. Ag
NIP. 150298987
Pembantu Pembimbing


Drs. Rahmat Fajri, M. Ag
NIP. 150275041
Penguji II


M. Alfarid Suryadilaga, M. Ag
NIP. 150289206

Yogyakarta, 15 September


Drs. H. M. Fahmi, M. Hum
NIP. 150088748

MOTTO

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah."

(Al-Quran Surat Ali-'Imran:110)¹

وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير

"Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."

(Al-Quran Surat Al-Baqarah: 110)²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), hlm. 94.

² *Ibid*, hlm. 30.

HALAMAN PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC
SUNAN KALIDAWA
YOGYAKARTA

Teriring rasa syukur kepada Allah karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak Pondiman dan Ibuku, yang dengan ikhlas berjuang demi menjalankan amanah-Nya untuk mendidik dan merawat dengan curahan kasih sayang.
2. Mas Bambang & Mba' Ndari, Mas Ndaru & Mba' Umy, dan keponakan2ku Hanifah dan adiknya yang imut. (Afif) terima kasih atas perhatian dan doa tulusnya.
3. Mbah Wignyo & mbah putri alm. (semoga Allah menempatkannya di sisi-Nya). Doa cucumu akan selalu teriring.
4. Untuk umat Muhammad saw. yang konsisten di jalan-Nya.
5. Buat Seindah-indahnya perhiasan dunia, semoga Allah mempertemukan kita dalam naungan cinta suci-Nya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهدى ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي
الكريم سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسن الى يوم الدين اما بعد

Segala Puji bagi Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, shahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Rasa syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan barokah dan keyakinan serta bantuan dari berbagai pihak kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul: **“BINGKAI ISLAM DALAM DEMOKRATISASI DI INDONESIA (Telaah atas Pemikiran Kuntowijoyo tentang Hubungan antara Islam dengan Negara)”** ini dapat terselesaikan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, selayaknyalah penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak.

Ucapan terima kasih secara tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H.M. Fahmi, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ketua Jurusan Perbandingan Agama, Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.A. yang telah melancarkan proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Bapak Drs. H.A. Singgih Basuki, MA selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Siswanto Masruri, M.A. dan Bapak Drs. Rahmat Fajri, M. Ag. masing-masing sebagai pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah meluangkan waktunya, juga memberikan pengarahan dan saran-saran dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini, sehingga kewajiban ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Prof.Dr.H. Agussalim Sitompul sebagai penguji dan Bapak M. Alfatih S, S.Ag, M.Ag. sebagai penguji dua yang telah memberikan pengarahan dalam merevisi skripsi penulis.
7. Teman-teman KKN'52 ada Joko, Imsa, Wedah, Iim, Udin, Sigit, Ali, dan Edy. Juga saudara-saudara Jelehan yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan KKN.
8. Teman-teman Jurusan PA'00: Riyanto, Muhdi, Yohana, Choy, Hani' Andri, Kholid, Inay, Eny, Syamsul, Ilham, Aris dan lainnya yang penuh kesabaran memberikan dorongan agar segera selesai.
9. Rekan-rekan RIMASKO (Remaja Islam Masjid Komaruddin), ada Mas Rahman, Koko, Lukman, Arfan, Nur Wahid, mbak Bhe, Aliske, dan lainnya, "teruskan perjuangan kalian! Allahu Akbar". Terima kasih atas doanya.
10. Ustadz Nazhif & Istrinya, "terima kasih telah dipinjami buku-buku". Untuk anaknya yang baru lahir Aqilah Azka Nuha An-Nazhivy yang imut

dan lucu, semoga menjadi anak yang sholehah yang menegakkan kalimat Tauhid di muka bumi dan berguna bagi masyarakat.

11. Pihak perpustakaan Kolese St. Ignatius yang telah membantu menyediakan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Kepada mereka semua diucapkan *Jazakumullah khairan katsirâ*, dan semoga Allah memudahkan jalan kebaikan bagi mereka dunia akhirat. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, Agustus 2005

Penulis



Alva Agus Widodo
NIM: 00520303

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

BINGKAI ISLAM DALAM DEMOKRATISASI DI INDONESIA

(Telaah Atas Pemikiran Kuntowijoyo
tentang Hubungan antara Islam dengan Negara)

Berbicara tentang relasi agama (baca: Islam) dan negara merupakan persoalan mendasar yang hingga sekarang masih menjadi perdebatan. Negara-negara Muslim mengalami hambatan untuk mengembangkan sintesis kepentingan antara agama dan negara. Di Barat persoalan mengenai hubungan antara agama dan negara diselesaikan dengan adanya sekularisasi. Dalam konteks perpolitikan Indonesia, polemik tersebut juga terjadi. Bahkan para tokoh yang memperjuangkan pendirian negara tidak luput dari polemik pro dan kontra perihal hubungan antara agama dan negara. Setelah merdeka diskursus di kalangan Muslim tentang tema tersebut masih saja terjadi.

Salah seorang tokoh cendekiawan kontemporer Indonesia yang berperan dalam mengkonsepsikan persoalan tersebut adalah Kuntowijoyo. Ia adalah tokoh yang memiliki basis ilmu sejarah, sehingga ia dapat memberanikan diri mencoba mengeluarkan gagasannya tentang bagaimana relasi antara agama dan negara dalam konteks ke-Indonesiaan dan kekinian. Skripsi ini bertujuan mengkaji pemikiran-pemikiran Kuntowijoyo tentang bingkai Islam dalam proses demokratisasi di Indonesia. Pemikiran transformatifnya tersebut penulis rinci menjadi beberapa tema, seperti Ilmu Sosial Profetik dan objektivikasi Islam, bentuk hubungan Islam dan negara, Islam dan Demokrasi. Sehingga dengan hal ini memunculkan setidaknya dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimana konsep pemikiran Kuntowijoyo. *Kedua*, bagaimana bingkai Islam dalam demokratisasi di Indonesia menurut Kuntowijoyo. Pendekatan yang digunakan adalah sosio-historis dengan pengertian bahwa setiap hasil pemikiran pada dasarnya merupakan hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan sosio-religius, sosio-politik, dan sosio-kultural yang ada di sekitarnya.

Dalam pandangan Kuntowijoyo, ada hubungan antara Islam dan negara. Islam secara historis dapat menjadi bingkai dan nilai etis dalam semua persoalan kenegaraan termasuk proses demokratisasi. Islam dapat menjadi hukum negara setelah adanya objektivikasi. Baginya, Pancasila adalah objektivikasi Islam. Ia juga berbicara tentang demokrasi dalam konteks Indonesia. Tetapi, konsep demokrasi sedikit berbeda dengan yang lain karena ia memberikan ruh dan nilai-nilai Islam.

Dari pandangan-pandangan Kuntowijoyo di atas kiranya dapat dilihat bahwa nampaknya ia kurang setuju Indonesia dijadikan sebuah negara Islam, tetapi ia juga tidak sependapat apabila negara ini menjadi negara sekuler.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 16 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 17 |
| D. Telaah Pustaka..... | 17 |
| E. Metodologi Penelitian..... | 21 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 25 |
| BAB II WACANA NEGARA DEMOKRASI DI DUNIA ISLAM | 26 |
| A. Wacana Klasik dan Pertengahan | 30 |
| B. Wacana Modern | 42 |
| C. Wacana Politik Kontemporer | 52 |
| BAB III KUNTOWIJOYO DAN PEMIKIRAN TRANSFORMATIF .. | 60 |
| A. Sketsa Biografi | 60 |
| B. Pemikiran Transformatif..... | 69 |

| | |
|---|------------|
| 1. Karya-karyanya | 75 |
| 2. Ilmu Sosial Profetik | 79 |
| 3. Objektifikasi Islam..... | 86 |
| BAB IV OBJEKTIFIKASI ISLAM DALAM BINGKAI DEMOKRATISASI DI INDONESIA..... | 95 |
| A. Epistemologi Politik | 95 |
| B. Format Hubungan Agama dan Negara | 97 |
| C. Agama dan Demokrasi..... | 103 |
| D. Pancasila sebagai Objektifikasi Islam | 113 |
| BAB V PENUTUP..... | 119 |
| A. Kesimpulan | 119 |
| B. Saran-saran..... | 120 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 122 |
| CURRICULUM VITAE | |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama (baca: Islam) dan negara adalah dua hal yang berbeda hakikatnya. Agama adalah kabar gembira dan peringatan (*basyiran wa nadziran*, baca QS. Al-Baqarah (2): 119), sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa (*coercion*). Agama punya khatib, juru dakwah, dan ulama, sedang negara punya birokrasi, pengadilan, dan tentara. Agama dapat mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama (*collective conscience*), sedang negara mempengaruhi sejarah dengan keputusan, kekuasaan, dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam dan negara adalah kekuatan dari luar.¹

Berbicara tentang hubungan antara agama dan negara merupakan persoalan mendasar yang menjadi perdebatan. Bahkan menjadi konflik ideologis disebabkan adanya pro dan kontra dari hubungan antara keduanya.² Negara-negara Muslim seperti Turki, Mesir, Maroko, Aljazair, Pakistan, Malaysia dan dunia Islam lainnya mengalami hambatan untuk mengembangkan sintesis yang memungkinkan antara ide-ide agama dan negara. Di wilayah-wilayah tersebut ditandai bukan dengan permusuhan melainkan dengan adanya ketegangan politik.³

¹ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, cet. II (Bandung: Mizan: 1997), hlm. 191-192.

² Pro dan kontra terjadi karena sebagian berpendapat bahwa Islam adalah universal, sehingga masalah Negara termasuk dalam urusan agama, sedangkan yang tidak setuju menganggap bahwa agama sebagai persoalan pribadi, bukan persoalan yang berkaitan dengan negara.

³ Bachtiar Efendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 2.

Situasi tersebut tidak hanya terjadi di negara-negara Muslim, melainkan juga belahan bumi lainnya. Di dunia Barat yang berdemokrasi Liberal⁴ juga terjadi perdebatan tentang hubungan antara agama dan negara. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan prinsip pemisahan antara agama dan negara. Di Barat yang terjadi adalah meletakkan kedudukan agama terpisah dengan posisi negara.⁵ Agama adalah masalah pribadi yang tidak boleh ada intervensi di dalamnya, sedangkan negara merupakan persoalan bersama warga negara.

Sekularisasi tumbuh subur di Barat, dianggap menjadi salah satu upaya menyelesaikan problem konflik seputar relasi antara agama dan negara. Agama di Barat diletakkan dalam posisi sebagai *private-sacret* (problem-ketuhanan), sedang negara pada posisi *public-profan* sebagai institusi sosial.⁶ Sejumlah penulis masa kini telah mengajukan tesis yang menyatakan bahwa sekularisasi di dunia Barat modern merupakan konsekuensi langsung dari dampak ide-ide Biebel⁷, sehingga terjadi adanya pelebagaan pemisahan antara agama dan negara. Di Barat juga berkembang humanisme sekuler dan salah tokoh dalam paham tersebut adalah Feuerbach yang mencerminkan komunis yang anti Tuhan dan menghendaki

⁴ Demokrasi Liberal adalah suatu bentuk lengkap mengenai demokrasi karena faktor dua komitmen fundamentalnya, yaitu berkaitan dengan kebebasan warga negara dan persamaan hak-hak mereka. Lihat Robert Audi, *Agama dan Nalar Sekuler*, terj. YUSDANI dan ADEN WIJDAN (Yogyakarta: UII Press dan PSI UII, 2002), hlm. 8.

⁵ Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gur Dur* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004), hlm. 25.

⁶ *Ibid.*

⁷ Lihat Donald Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis*, terj. Machnun Husain (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 41.

permusuhan agama, bukan lagi pemisahan agama,⁸ sehingga yang terjadi adalah pelembagaan pemisahan antara agama dan negara.⁹ Agama hanya dalam urusan Gereja dan permasalahan kenegaraan diatur oleh kebijakan manusia dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan.

Menurut Nurcholish Madjid, sekularisasi adalah upaya untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi, melepaskan umat dari kecenderungan meng-ukhrawi-kannya. Dalam konteks ini sekularisasi lebih dimaksudkan sebagai kesediaan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali kebenaran suatu nilai dihadapan kenyataan-kenyataan material, moral ataupun historis. Dengan demikian, sekularisasi dapat dipakai untuk memantapkan tugas duniawi manusia sebagai khalifah di bumi. Inilah yang membedakannya dengan sekularisme.¹⁰

Lebih lanjut menurut Nurcholish Madjid, sekularisasi tidak dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, sebab sekularisme merupakan istilah untuk sebuah ideologi, sebuah pandangan dunia baru yang tertutup yang berfungsi serupa dengan agama. Sekularisasi justru merupakan syarat untuk lebih menjelaskan fungsi nilai-nilai agama secara lebih proporsional yang bertujuan untuk mendesakralisasikan segala sesuatu selain hal-hal yang benar-benar bersifat ilahiah (*transendental*), yaitu dunia ini. Tidak ada yang sakral kecuali Tuhan.

⁸ Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafik, 1993), hlm. 36.

⁹ Robert Audi, *Agama dan Nalar....*, *op. cit.*, hlm. 8.

¹⁰ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 207.

Dunia adalah sebuah kenyataan yang bersifat *profan*, sehingga harus dihilangkan sifat-sifat sakralnya.¹¹

Berbeda dengan Nurcholish Madjid, Amien Rais menolak sekularisme (ideologi) maupun sekularisasi yang mempertentangkan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, yang transendental dan temporal, atau profan dan sakral.¹² Amien Rais berpandangan bahwa sekularisasi merupakan suatu proses yang secara lambat atau cepat menuju pada sekularisme. Sulit dipahami jika ada orang yang mempertajam perbedaan antara sekularisme dengan sekularisasi. Bentuk terakhir ini merupakan proses menuju sekularisme.¹³ Oleh karena itu, Amien Rais tidak setuju dengan adanya sekularisasi yang pada akhirnya akan menjadi sekularisme.

Seperti yang dialami di belahan bumi lainnya, hubungan agama dan negara tidak jauh berbeda.¹⁴ Dalam sejarah pembentukan negara Indonesia yang penulis cuplik secara singkat berikut ini tampak bahwa konflik-konflik ideologis sudah terjadi sejak BPUPKI dibentuk sebagai badan yang menyusun dasar-dasar negara Indonesia hingga pada masa konstituante 1956. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945¹⁵ dengan anggota sidang berjumlah 68 orang. Sidang tersebut diawali oleh pidato dari Saiko Syikikan, Gunseikan. Dalam pidatonya tersebut

¹¹ *Ibid.*

¹² M. Amien Rais, "Sekularisme: Proyek Menjauhkan Agama", dalam *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 75.

¹³ *Ibid.*, hlm. 77.

¹⁴ Bachtiar Efendy, *op. cit.*..., hlm. 4.

¹⁵ A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia: Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 26.

memberikan himbauan kepada BPUPKI supaya mengadakan riset yang cermat terhadap dasar-dasar yang akan dijadikan sebagai dasar atau Ideologi Negara Indonesia merdeka sebagai suatu benang merah dalam lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya.¹⁶

Seorang tokoh yang dari Indonesia yang mengawali pembicaraan dalam sidang tersebut adalah dr. Rajiman Widyadiningrat yang mengajukan sebuah pertanyaan filosofis yaitu dengan dasar apa negara ini dibentuk? Kekhawatiran menghampiri para anggota sidang yang merasa takut terjadinya perpecahan di antara mereka kalau muncul perbedaan pandangan. Hal ini sangat penting untuk dibicarakan dengan tujuan mengkonsepsikan bentuk negara yang paling sesuai di dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Beberapa tokoh yang siap menjawab pertanyaan tersebut adalah Soekarno, Moh. Yamin, dan Supomo. Mereka secara argumentatif mengemukakan pandangan tentang dasar negara Indonesia.¹⁷ Soekarno dan Moh. Yamin mengemukakan Lima Prinsip Dasar yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Golongan Islam yang diwakili Ki Bagus Hadikusumo mengajukan Islam menjadi dasar negara sebagai anti-tesis pendapat Soekarno dan Yamin.¹⁸ Pihak Islam menginginkan negara yang berdasarkan Islam, sedang Soekarno dan Yamin sebagai wakil pihak nasionalis menginginkan dasar negara Pancasila. Harapan pihak Islam pupus untuk mendirikan negara

¹⁶ Listiyono Santoso, *op. cit.*, hlm. 22. Dikutip dari Moh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*. Jilid 1 (Jakarta: Prapantja, 1959), hlm. 803.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik...*, *op. cit.*, hlm. 27.

Islam karena mayoritas anggota sidang menyetujui usulan Soekarno dan Yamin yaitu Pancasila sebagai dasar negara.¹⁹

Perjuangan dari Islam terus berlanjut, walaupun mereka kalah dalam “kompetisi” penentuan dasar negara. Hal ini terbukti dengan usaha mereka untuk memasukkan Islam ke dalam Pancasila. Perdebatan antara pihak Islam dan nasionalis akhirnya dimenangkan oleh pihak Islam dengan ditetapkannya Piagam Jakarta ada tanggal 22 Juni 1945 yang dianggap sebagai modus atau persetujuan antara pihak Islam dengan pihak Nasionalis. Dalam Piagam Jakarta tersebut pada Sila Ketuhanan ada anak kalimat yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.²⁰ Kompromi politik dalam Piagam Jakarta ini hanya bertahan kurang lebih selama 57 hari.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 beberapa pemimpin mengadakan pertemuan yang membicarakan ke-7 kata tersebut dan konsekuensinya bagi keutuhan Indonesia. Perbincangan antara Moh. Hatta dan Tengku Muhammad Hasan yang menerangkan kepada Ki Bagus Hadikusumo tentang dampak dari ke-7 kata tersebut terhadap keutuhan Indonesia, maka pada akhirnya kalimat itu dihapus demi keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Anggapan diskriminasi ini datang dari golongan Kristen yang merasa bahwa keputusan dalam Piagam

¹⁹ Lihat Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante, Islam, dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 102-108. Menurut Ki Bagoes Hadikukumo, di dalam Islam ada konsep tentang Negara Islam. Ia berpendapat bahwa di dalam Al-Qur’an dr 6000 ayat 600 ayat saja yang membahas persoalan ibadah dan yang dimuat selebihnya masalah politik dan lainnya. Gagasannya ditambah oleh Soepomo, Indonesia tidak sama dengan Irak, Iran, Mesia atau Suriah. Ia memiliki kekasan tersendiri dan kurang yakin dengan Islam yang masih relevankah dengan tuntutan zaman.

²⁰ Sebuah kalimat yang menjadi pergumulan antara golongan Islam dan nasionalis. Lihat Endang Saifuddin Anshori, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, dikutip dari Syafi’i Ma’arif, *Islam dan Politik...*, op cit., hlm. 28.

Jakarta itu tidak menguntungkan bagi golongan minoritas. Akhirnya ke tujuh kata itu dihapus. Penghapusan ketujuh kata tersebut terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 dihilangkan dari UUD 1945.²¹ Pada akhirnya disepakati untuk mengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembukaan UUD tersebut. Kembali pihak Islam dikecewakan dengan keputusan penghapusan tujuh kata tersebut.

Dalam Konggres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta yang pertama setelah Indonesia merdeka pada tanggal 7-8 November 1945 para pemimpin Islam membentuk Partai Islam Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) sebagai satu-satunya yang mewakili aspirasi umat Islam Indonesia.²² Maka partai Islam yang ada seperti PSII dilebur menjadi satu dengan Masyumi, sedangkan organisasi-organisasi sosial Islam seperti Muhammadiyah, NU, Al-Jami'ah Wasliyah dan lain-lain menjadi anggota istimewa dari Masyumi sehingga dengan demikian partai Masyumi tampil sebagai partai unitaris (persatuan).²³ Munculnya Masyumi dipandang sebagai jawaban positif umat terhadap Maklumat Wakil Presiden Hatta tertanggal 1 November yang mendorong pembentukan partai-partai. Bila dihubungkan dengan situasi tahun 1945, maka pembentukan Masyumi adalah dalam rangka menyalurkan aspirasi politik umat sebagai cerminan dari potensi mereka yang besar dan kongkrit.

²¹ *Ibid.*, hlm. 28.

²² Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi...*, *op.cit.*, hlm. 135.

²³ A.A. Sumantri, *Hari Ulang Tahun Partai Politik Islam Masyumi ke-XI* (Surabaya: Pimpinan Wilayah Masyumi Jatim, 1956), hlm. 27

Tampilnya Masyumi sebagai partai Islam yang bercorak kesatuan dalam bulan-bulan pertama kemerdekaan Indonesia bukan suatu peristiwa kebetulan dalam sejarah (*an historical accident*) yang dilatarbelakangi oleh suatu kesadaran yang dalam dan panjang. Masyumi lahir dapat dikatakan sebagai suatu kehormatan sejarah (*an historical necessity*) bagi perjalanan politik umat Islam Indonesia.²⁴ Latar belakang didirikannya Masyumi: Pertama, karena untuk menyatukan kekuatan umat Islam dalam menghadapi penjajahan Belanda dalam perang kemerdekaan untuk mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Kedua, untuk memperjuangkan agar Islam menjadi dasar Negara.

Namun dasar perjalanan sejarah persatuan umat Islam dalam Masyumi itu tidak berlangsung lama. Terbukti dengan munculnya kembali PSII (Partai Serikat Islam Indonesia) sebagai partai pada bulan Juli 1947. Munculnya kembali PSII sebagai partai adalah karena ulah PKI. Tahun 1947 tokoh PKI yaitu Mr. Amir Syarifuddin mendapat mandat dari Presiden untuk membentuk kabinet. Untuk mendapat dukungan dari semua pihak, kabinet harus didukung oleh semua kekuatan-khususnya umat Islam. Masyumi tidak bersedia mendukung kabinet Amir Syarifuddin karena dipimpin oleh orang komunis (PKI). Maka untuk mewakili umat Islam dalam kabinet secara licik Wondo Amiseno yang berasal dari PSII dipaksa untuk menghidupkan kembali PSII dan ia juga dipaksa pula untuk bersedia menjadi Menteri Dalam Negeri mewakili umat Islam dalam kabinet Amir Syarifuddin. Kama sejak itulah PSII pada bulan Juli 1947 kembali menjadi partai yang sebelumnya sudah meleburkan diri dalam partai Masyumi.

²⁴ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam....,op. cit.*, hlm. 41.

NU lima tahun kemudian keluar dari Masyumi karena jabatan Menteri Agama dalam kabinet tidak berasal dari golongan NU. Kebetulan yang terpilih dalam rapat DPP Masyumi untuk menjadi Menteri Agama mewakili umat Islam dalam kabinet adalah KH. Fakhri Usman dari Muhammadiyah. Maka tanggal 3 April 1952 NU menyatakan keluar dari Masyumi. Keputusan itu disahkan pada Muktamar NU ke 19 di Palembang bulan Mei 1952. Adapun Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) sejak berdiri bulan November 1945 tidak pernah bergabung dengan Masyumi karena Masyumi tidak menganut Madzhab Syafi'i sebagaimana yang dianut Partai Islam Perti. Maka dalam Pemilu I²⁵ pada tanggal 29 September tahun 1955 umat Islam keluar dengan empat partai atau empat gambar, yaitu: Masyumi, NU, PSII, Perti. Dalam Pemilu tersebut keluar sebagai empat pemenang besar dalam perolehan suara di DPR, yaitu: PNI dengan 57 kursi, Masyumi dengan 57 kursi, NU dengan 45 kursi, PKI dengan 26 kursi.

Umat Islam menyambutnya dengan gembira disebabkan adanya harapan agar dapat kembali memperjuangkan cita-citanya menjadikan Islam sebagai dasar Negara Indonesia dan arus kancah formal (Konstituante).²⁶ Kemudian tanggal 15 Desember 1955 diadakan pemilihan umum untuk anggota-anggota Konstituante. Badan ini adalah mendapat tugas menyusun Undang-Undang Dasar termasuk dasar negara. Namun, badan ini tidak mampu menyusun sebuah Undang-Undang Dasar baru pengganti UUDS 1950. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden

²⁵ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-legal Atas Kontitusional 1956-1959*, terj. Sylvia Tiwon (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 28-34.

²⁶ Mahmud Suyuti, *Politik Tarekat: Qodariyah wa Naqsabandiyah Jombang* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 135.

Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali ke UUD 1945.

Kemudian masa Demokrasi Terpimpin yakni antara tahun 1959-1965 yang kontroversial kekuatan Islam menjadi dua golongan yaitu golongan yang kebijakan menentang Presiden Soekarno yakni Masyumi dan golongan yang setuju kepada kebijakan Presiden Soekarno yaitu karena tidak ada satu kekuatan manapun yang mampu pernah secara 43+520 anggota Konstituante tambah Isebagai syarat syahnya satu keputusan Konstituante, kelompok ini berasal dari Liga Muslimin (NU, PSII, Perti). Kekuatan Masyumi terpecah karena berbeda dalam menghadapi pemerintahan Soekarno. Di mana Masyumi menentang berbagai kebijakan politik Soekarno seperti Manipol, Demokrasi Terpimpin, dan lain-lain. Sedangkan PSII, NU dan Perti menerima kebijakan politik Soekarno.

Dalam Demokrasi Terpimpin itu peran politik Islam terpinggirkan dengan adanya jargon “Nasakom” (Nasionalis, Agama, dan Komunis).²⁷ NASAKOM dicetuskan bertujuan untuk mempersatukan seluruh kekuatan bangsa Indonesia menurut cara berpikir Soekarno. NASAKOM dicetuskan di Istana Tampak Siring Bali dengan kolaboratornya adalah Mr. Ali Sastroamidjoyo mewakili golongan Nasionalis (PNI, dll), Idham Khalid mewakili golongan Islam-NU, dan DN. Aidit mewakili golongan Komunis PKI. Secara resmi NASAKOM diumumkan lewat pidato kenegaraan Presiden Soekarno pada HUT Kemerdekaan RI ke-16 pada tanggal 17 Agustus 1961.

²⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam...., op. cit.*, hlm. 51-77.

Melihat sekilas perjalanan sejarah Indonesia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Islam dan negara sangat tidak mudah diwujudkan bahkan seakan-akan menjadi konflik ideologi yang abadi. Konflik ideologi yang terjadi di berbagai bangsa di dunia ini termasuk Indonesia. Persoalan ini tampaknya menjadi persoalan yang prinsip yang belum pernah tuntas. Dalam hal ini Din Syamsudin melihat adanya tiga tipologi dalam relasi antara posisi agama (Islam) dan negara. *Pertama*, agama harus terpisah jelas. *Kedua*, negara terpisah dari agama, tetapi tetap merujuk kepada persoalan agama. *Ketiga*, negara dan agama menyatu (*integrated*).²⁸

Tidak berbeda dengan apa yang diutarakan Din Syamsudin di atas, Ma'sud Murod al-Brebesy tentang relasi agama dan negara ini membuat tipologisasi ke dalam empat muara. *Pertama*, model negara sekularistik atau "separasi Mutlak", yaitu negara yang memisahkan agama dan negara secara mutlak dan menegaskan bahwa negara tidak mengurus agama, begitu pula sebaliknya. *Kedua*, model negara totaliter atau subornasi agama oleh negara, yaitu agama dibayang-bayangi negara. *Ketiga*, negara agama atau subornasi negara oleh agama. Model ini menghendaki agar negara didasarkan pada salah satu agama tertentu, atau negara diadakan berdasarkan hukum agama tertentu. *Keempat*, model negara sekuler yang memandang penting agama hingga terjadi relasi timbal balik antara agama dan negara.²⁹

²⁸ M. Din Syamsudin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Jurnal Ulumul Quran*, Volume 4, no. 2 th. 1993, hlm. 4. Dikutip dari Akh. Muzakki, *Mengupas Pemikiran Agama dan Politik sang Pahlawan Reformasi* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), hlm. 31.

²⁹ Murod al-Brebesy, *Menyikapi Pemikiran Politik Gus Dur & Amien Rais* (Jakarta: PT. RajaGrafind, 1999), hlm. 48-49.

Sulitnya menyatukan antara Islam dan negara menimbulkan banyak pertanyaan, apakah Islam hanya dalam dataran moral saja dan tidak dapat masuk ke wilayah politik? Atau apakah negara hanya menjadi persoalan dunia saja sehingga mengesampingkan agama? Sebenarnya persoalan tersebut menjadi tema krusial di negara manapun di belahan bumi ini dalam konstelasi politik mereka. Sulitnya menyatukan agama dan negara setidaknya ada dua faktor: *pertama*, faktor politik, karena tidak berhasil memperoleh suara dua pertiga tambah satu ($2/3+1$) dari anggota Kontituante sebagai syarat sahnya satu keputusan Konstituante. *Kedua*, faktor akidah karena golongan Islam ingin menjadikan Islam sebagai dasar Negara, sedangkan golongan lain menilak. Di tengah-tengah perdebatan ideologi tersebut, agama sering kali diposisikan untuk kepentingan penguasa dan mempertahankan status quo, diperalat untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada rezim ototiter yang ingin berkuasa terus. Kecenderungan tersebut telah mengemuka takala diinstitutionalkannya agama ke dalam lembaga negara di Indonesia yang sampai sekarang masih perdebatan.³⁰

Di tengah-tengah dialektika mengenai hubungan Islam dan negara di atas yang menunjukkan kepada kondisi yang berlawanan, terdapat pemikir Muslim Indonesia yang berusaha untuk mencari varian jalan tengah,³¹ salah satunya yaitu Abdurrahman Wahid. Menurutnya, di dalam Islam tidak terlihat ada konsep pemerintahan definitif sebagai contoh adalah suksesi. Masalah yang dianggap

³⁰ Listiyono Santoso, *op.cit.*, hlm. 27.

³¹ Akh. Muzakki, *op. cit.*, hlm. 37.

urgen dan Islam menggunakan pola: *istikhlaf*, *bay'ah*, dan *ahl al-hall wa al'aqd*.³² Bila Islam mempunyai konsep mengenai negara, tentu saja pola yang dikembangkan dalam persoalan kenegaraan seperti berkaitan dengan suksesi tersebut, tidak mengalami variasi yang demikian.³³

Abdurrahman Wahid tidak setuju dengan penafsiran Abul A'la Al-Maududi. Maududi menegaskan bahwa negara adalah bagian integral Islam. Menurutnya, Islam memiliki konsep sendiri tentang negara dan sistem pemerintahan yang lengkap. Syari'ah dan yurisprudensi dapat diterapkan langsung dalam kehidupan.³⁴ Politik Islam disebut juga sebuah demokrasi, tetapi teokrasi dalam arti bahwa apabila terdapat perintah-perintah atau hukum yang telah jelas dan terang-terangan dari Tuhan atau Rasul-Nya, maka tidak seorang pun, atau tidak satu pun lembaga legislatif, yang berhak untuk melaksanakan perlembagaan secara mandiri, sekalipun seluruh Muslim di segenap penjuru dunia mencapai sepakat bulat untuk mengubahnya. Kedaulatan ada di Tangan Allah.³⁵ Rupanya Abdurrahman Wahid tidak ingin masuk dalam mainstream sekuler maupun Negara Islam. Islam sebagai pijakan dan bukan berarti menerapkannya secara langsung, tetapi disesuaikan dengan konteks di mana ia berada. Abdurrahman

³² Tentang masalah ini lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 134.

³³ Abdurrahman Wachid, "Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama", *Aula*, edisi Mei 1985, seperti dikutip oleh Murod al-Brebesy, *Menyikapi Pemikiran Politik Gus Dur & Amien Rais tentang Negara*, hlm. 15.

³⁴ Abdul Aziz, "Pemikiran Etika Politik Abdullah Ahmad An-Naim", *RELIGI*, III, No. 2, Juli 2004, hlm. 181.

³⁵ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmah, cet. IV (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 156-160.

Wahid sangat menghormati nilai-nilai agama secara substansial, walaupun nilai tersebut tidak harus diwujudkan dalam legalitas formal.³⁶

Skripsi ini berbicara tentang seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang modernis, yakni Kuntowijoyo. Ia merupakan tokoh yang memiliki pemikiran transformatif. Beliau dimasukkan dalam pelompok Neo-Modernis bersama tokoh-tokoh lain, seperti Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib, Djohan Efendi, Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Jalaluddin Rahmad, dan tokoh-tokoh lain yang sering diidentikkan dengan gerakan Neo-Modernis.³⁷

Syafi'i Anwar dalam bukunya yang berjudul *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, memasukkan Kuntowijoyo dalam kelompok cendekiawan Muslim dengan pemikiran transformatif. Pangkal tolak dari pemikiran tersebut adalah didasari dengan pandangan dunia (*world view*) Islam, bahwa visi agama ini adalah kemanusiaan. Maka dari itu, Islam harus menjadi kekuatan yang bisa memberikan dorongan secara kontinyu, dan mentransformasikan masyarakat dengan berbagai aspeknya ke dalam skala-skala besar yang mempunyai sifat praksis maupun teoritis.³⁸

Bagi Kuntowijoyo, Al-Quran adalah paradigma.³⁹ Yang ia maksud dalam konteks ini seperti dipahami oleh Thomas Kuhn, bahwa realitas sosial dibangun

³⁶ Listiyono Santoso, *op.cit.*, hlm. 41.

³⁷ Lihat Budhy Munawar-Rahman, "Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah Pemikiran Neo-Modernisme Islam di Indonesia", dalam *Ulumul Quran*, No.3, Vol. VI, Tahun 1995, hlm. 5.

³⁸ M. Syafi'i Anwar, "Pemikiran Politik dengan Paradigma Al-Quran: Sebuah Pengantar", dalam Kuntowijoyo, *Identitas Politik....*, *op.cit.*, hlm. xvii.

³⁹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, A.E. Priyono (ed.) (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 327.

oleh *mode of thought* atau *mode of inquiry* tertentu, baginya paradigma Al-Quran adalah konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas seperti yang dimaksud sendiri oleh Al-Quran. Dalam pengertian bahwa Al-Quran mengkonstruksi pengetahuan yang memberikan dasar bagi seseorang untuk berbuat.⁴⁰ Fungsi paradigma Al-Quran adalah mengkonstruksi perspektif Al-Quran dalam rangka memahami realitas.⁴¹ Al-Quran dijadikan pijakan dalam berbuat, demikian juga dalam konteks kenegaraan.

Namun demikian, Kuntowijoyo menjadikan pandangannya bahwa dalam konteks ke-Indonesiaan tidak mungkin dijadikan negara Islam dan Al-Quran diterapkan secara apa adanya. Sebelum diterapkan Al-Quran dan Al-Hadits harus diobjektifikasi terlebih dahulu. Hal ini tampak pada pemerimaannya pada Pancasila.⁴² Pancasila sebagai sesuatu yang rasional. Konsep negara rasional yang mendasarkan pada kekuasaan sistem dan aturan hukum (*rule of law*).⁴³ Negara rasional juga berarti negara objektif,⁴⁴ yaitu adalah negara yang mengakui

⁴⁰ *Ibid*, hlm. xviii.

⁴¹ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, & Etika*, cet. II. (Bandung: Teraju, 2005), hlm. 17.

⁴² Kuntowijoyo nampaknya hampir mirip kalau boleh dikatakan sama dengan pemikiran Abdurrahman Wachid, yaitu Indonesia harus tetap berpegang pada Pancasila. Ia merupakan kompromi yang memungkinkan orang Indonesia dapat hidup bersama-sama dalam negara yang non Muslim yang dikutip Douglas E. Ramage, dalam Greg Fealy dan Gerg Barton, ed, 1997, hlm. 196. lihat Listiyono Santoso, *op. cit.*, hlm. 40.

⁴³ Lihat, Kuntowijoyo, *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas*, cet I (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 206.

⁴⁴ Kuntowijoyo, *Identitas Politi...*, *op. cit.*, hlm. 71-72. Objektif (Objektivikasi) adalah penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif. Ini juga disebut konkretisasi dari keyakinan internal, yaitu sesuatu perbuatan yang dirasakn orang non muslim sebagai sesuatu yang sewajarnya (natural), tidak sebagai perbuatan keagamaan. Agar Islam bisa benar-benar dirasakan sebagai rahmat yang berbuat adil kepada siapa pun, objektivikasi Islam perlu diketahui secara luas.

pluralitas suatu bangsa.⁴⁵ Pancasila menerima bangsa ini sebagai bangsa yang pluralis. Menurutnya, negara Pancasila sebagai yang final dan objektif dan menegaskan bahwa Pancasila merupakan objektivikasi Islam,⁴⁶ walau tidak menjadikan menjadi sebuah negara Islam. Ia menambahkan bahwa Pancasila memberi pesan ikatan dan dasar bagi kesatuan kebangsaan selama ini.⁴⁷

Penelitian ini memfokuskan diri untuk menelaah pemikiran Kuntowijoyo, karena ada keunikan-keunikan tersendiri dari pandangan-pandangannya. Penulis hanya membatasi pada wilayah Islam dan negara, gagasannya tentang relasi dua persoalan tersebut, tidak sampai kepada hal lain karena semakin kompleks persoalan yang dihadapi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemikiran transformatif Kuntowijoyo?
2. Bagaimana objektivikasi Islam dalam demokratisasi di Indonesia menurut Kuntowijoyo?

⁴⁵ Kuntowijoyo, "Menuju Negara Rasional", dalam Tim MAULA (ed.), *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 232-233.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Kuntowijoyo, *Demokrasi dan Budaya Birokrasi*, cet. I (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 5.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami konsep pemikiran transformatif Kuntowijoyo.
2. Mengetahui pandangan Kuntowijoyo tentang objektifikasi Islam dalam demokratisasi di Indonesia

Kegunaan Penelitian

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi khasanah wacana tentang relasi agama dan negara.
2. Menambah pengetahuan khususnya gagasan-gagasan dari Kuntowijoyo tentang bingkai Islam dalam demokratisasi di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Islam dan negara sebenarnya telah banyak diteliti, namun yang menarik perhatian penulis bahwa secara *intens* belum ada yang memfokuskan riset tentang Islam dan negara dari pandangan Kuntowijoyo. Maka dari itu, penulis mencoba mengangkat tema ini ke permukaan. Penelusuran pustaka ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persoalan tersebut pernah dibicarakan orang. Setelah itu, akan dilihat permasalahan apa yang diangkat, bagaimana pendekatan yang dipakai serta metodologinya, adakah perbedaan dan juga persamaannya. Dengan adanya hal-hal tersebut sekiranya penulis dapat menghindari pengulangan-pengulangan.⁴⁸

⁴⁸ Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI (1947-1997)* (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 21-22.

Skripsi yang berbicara tentang Kuntowijoyo yaitu yang ditulis oleh Imron dengan judul *Pemikiran Kuntowijoyo Tentang Aktualisasi Politik Islam Masa Orde Baru*. Secara umum menggambarkan tentang bagaimana posisi politik Islam pada masa orde baru, juga menjelaskan tentang bagaimana peran politik Islam dalam membangun umat dari pandangan Kuntowijoyo. Dengan menggunakan pendekatan sosio-historis skripsi ini ingin melihat pada masa Orba peran politik umat Islam yang terpinggirkan sehingga menyebabkan Kuntowijoyo merasa terpinggil untuk mengkonsepsikan peran politik umat Islam agar tidak terpinggirkan.

Kedua, skripsi yang ditulis Khusnul Muttaqin dengan judul *Pemikiran Kuntowijoyo tentang Objektivikasi Islam dan Urgensinya bagi Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*. Skripsi ini sedikit mengulas Objektivikasi Islam yang dinilai mempunyai ungensi terhadap pembangunan hukum Islam di Indonesia. Sebab, selain masih tetap memegang Al-Quran terlebih dahulu sebagai hukum positif, yang pembentukannya atas persetujuan bersama warga negara dalam pluralitas agama dan budaya. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik, skripsi ini mencoba mengulas pandangan-pandangan Kuntowijoyo tentang objektivikasi Islam dalam pengembangan hokum di Indonesia.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Maksum dengan judul *Studi Perbandingan Pemikiran Imam Khomeni dan Kuntowijoyo tentang Negara dan Demokrasi*. Skripsi ini berbicara tentang perbedaan pandangan dari tokoh tersebut tentang negara dan demokrasi, tetapi tidak menjelaskan mengenai Islam dan negara. Skripsi ini memaparkan pandangan-pandangan dari Imam Khomeni dan

Kuntowijoyo tentang bagaimana bentuk negara dan demokrasi. Imam Khomeni menawarkan bentuk negara Islam sedangkan Kuntowijoyo menawarkan bentuk negara objektif. Pendekatan yang digunakan adalah komperatif, bagaimana persamaan ataupun perbedaan dari kedua tokoh tentang Negara dan demokrasi.

Keempat, skripsi yang ditulis Muslim Khoiri yang berjudul *Gagasan Teologi Transformasi (Telaah Atas Pemikiran Keagamaan Kuntowijoyo)* yang secara garis besar mencoba meneliti gagasan Teologi Transformatif dalam pemikiran Kuntowijoyo. Dengan menggunakan pendekatan sosio-historis, Khairi mencoba memahami gagasan Kuntowijoyo dalam bingkai perkembangan teologi kontemporer Indonesia. Dengan kata lain, Khairi ingin menggambarkan karakteristik dan kecenderungan gagasan Kuntowijoyo dalam wacana Teologi Transformatif.

Kelima, Skripsi dari Abdul Syukur dengan judul *Hermeneutika Sosial: Kajian Metode Pemahaman Al-Quran Kuntowijoyo*. Secara umum penelitian ini membicarakan tentang karakteristik model penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh Kuntowijoyo dengan berusaha menemukan landasan histories hermeneutika sosial. Selain itu, skripsi tersebut juga memaparkan secara jelas bagaimana hermeneutika social Al-Quran Kuntowijoyo, meskipun dalam banyak tulisannya Kuntowijoyo tidak menggunakan istilah hermeneutika sosial dalam memahami Al-Quran. Namun, Kuntowijoyo banyak menggunakan Paradigma Al-Quran, yang menurut Syukur menjadi dasar pembentukan hermeneutika Al-Quran.

Keenam, Buku yang ditulis oleh M. Fahmi yang berjudul *Islam Transendental: menelusuri Jejak-jejak Pemikiran Kuntowijoyo*. Buku ini secara

umum berbicara tentang gagasan Kuntowijoyo mengenai metode strukturalisme transendental sebagai metode penerapan ajaran sosial Islam dan gagasan Kuntowijoyo tentang Ilmu Sosial Profetik dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sosial. dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika untuk melihat sejauh mana penerapan ajaran Islam dalam Transformasi sosial.

Studi ilmiah tentang pemikiran Kuntowijoyo sebenarnya telah banyak dikaji. Jika dibandingkan dengan kajian-kajian di atas, skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian tentang pemikiran Kuntowijoyo tentang relasi antara Islam dan negara dalam bingkai Islam dalam demokratisasi di Indonesia yang dalam penelitian lain tidak ditemukan. Penelitian ini akan menelusuri tentang konsep objektifikasi Islam yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo sebagai solusi terhadap dialektika tentang hubungan antara Islam dan negara khususnya dalam konteks Indonesia.

Dari tinjauan pustaka ini, apabila ditarik kesimpulan dengan melihat skripsi-skrripsi dan buku-buku tentang pemikiran Kuntowijoyo, penulis belum melihat adanya pembahasan khusus mengenai pemikiran Kuntowijoyo tentang relasi antar Islam dan negara. Kuntowijoyo sebagai seorang pemikir yang memiliki keahlian yang boleh dikatakan lengkap. Selain dalam bidang sejarah, ia juga seorang sastrawan dan termasuk dalam golongan cendekiawan Muslim. Tentu saja seorang cendekiawan akan mempunyai kepedulian terhadap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai cendekiawan Muslim, Kuntowijoyo rupanya merasa terpanggil untuk mengkonsepsikan gagasan-

gagasan mengenai objektifikasi Islam dalam konteks Indonesia. Menjadi sebuah ketertarikan bagi para peneliti untuk mengkaji pemikiran keagamaan Kuntowijoyo. Ada yang berbicara tentang Negara dan demokrasi, ada yang berbicara tentang objektifikasi dan urgensinya terhadap pengembangan hukum Islam di Indonesia, gagasan Teologi Transformatif Kuntowijoyo, dan aktualisasi politik Islam di Indonesia yang semuanya sepakat bahwa Kuntowijoyo memiliki pemikiran yang sangat toleran terhadap hukum telah diterapkan di Indonesia.

E. Metodologi Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.⁴⁹ Agar tujuan itu memperoleh hasil yang memuaskan, serta terarah dan rasional, maka dipergunakan metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai bahan yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, naskah-naskah, jurnal-jurnal, dan semua yang mendukung dalam penelitian ini.⁵⁰ Mengingat skripsi ini sebagai penelitian kepustakaan, maka data-data yang diambil tidak dari lapangan.

⁴⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 131.

⁵⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mander Maju, 1996), hlm. 3.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-Analisis*. Deskriptif ialah menuturkan dan menafsirkan yang ada.⁵¹ Pada umumnya deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.⁵² Sedang yang dimaksud dengan analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan sekedar memperoleh kejelasan dari objek penelitian.⁵³

3. Sumber Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga tidak menggunakan teknik pengumpulan data di lapangan, namun yang dilakukan adalah mengumpulkan selengkap mungkin, baik data primer, yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama,⁵⁴ yaitu buku-buku yang ditulis oleh Kuntowijoyo sendiri, dan data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain⁵⁵ atau para cendekiawan yang merespon dan mengkritik pemikiran-pemikiran Kuntowijoyo.

Sumber data-data primer dari Kuntowijoyo, seperti: *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*

⁵¹ Winarno Surakhmad, *op. cit.*, hlm. 139

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. XI (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1998), hlm. 245.

⁵³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 59.

⁵⁴ Winarno Surakhmad, *op. cit.*, hlm. 134.

⁵⁵ *Ibid.*

(Bandung: Mizan, 1991), *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas* (Bandung: Mizan, 2002), *Demokrasi dan Budaya Birokrasi* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994), *Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru* (Bandung: Mizan, 1995), *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia* (Yogyakarta: Solahuddin Press, 1992), *Strategi Baru Politik umat Islam* (Yogyakarta: Mizan, 1998), dll. Selain itu juga sumber data-data sekunder yang membahas mengenai pemikiran-pemikiran Kuntowijoyo, baik buku-buku dari para cendekiawan maupun skripsi yang membahas dan mengkritik pandangan-pandangannya, juga yang ada di dalam jurnal-jurnal.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan, yaitu: *pertama*, pendekatan *sosio-historis*. Setiap hasil pemikiran pada dasarnya merupakan hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan sosio-politik dan sosio-kultural yang ada di sekitarnya.⁵⁶ Mengingat Kuntowijoyo adalah sebagai seorang sejarawan, maka penulis mengambil buah pikir beliau tentang sejarah pemikiran. Sejarah pemikiran berarti studi tentang peran gagasan di dalam peristiwa sejarah dan proses.⁵⁷ Semua perbuatan manusia pasti dipengaruhi pemikiran. Misalnya, Muhammadiyah dipengaruhi oleh KH. Ahmad Dahlan. Karenanya, sebagai “daging yang berpikir” manusia tidak lepas dari dunia pemikiran. Dalam sejarah pemikiran ini timbul dua permasalahan, yaitu: pelaku dan tugas sejarah pemikiran. Untuk menghadapi tugas-tugasnya,

⁵⁶ Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105.

⁵⁷ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 189.

sejarah pemikiran memiliki beberapa macam pendekatan, diantaranya: kajian teks, kajian konteks sejarah, dan hubungan antara teks dengan masyarakatnya.

Pertama, kajian teks. Teks dibagi lagi menjadi genesis pemikiran, konsistensi pemikiran, evolusi pemikiran, sistematika pemikiran, perkembangan dan perubahan, varian pemikiran, komunikasi pemikiran, dan kesinambungan pemikiran. *Kedua*, kajian konteks meliputi konteks sejarah, konteks politik, konteks budaya, dan konteks sosial. *Ketiga*, kajian hubungan antara teks dan masyarakat dibagi menjadi pengaruh pemikiran, implementasi pemikiran, diseminasi pemikiran, dan sosialisasi pemikiran.

Untuk skripsi ini yang paling sesuai yaitu *genesis pemikiran*.⁵⁸ Orang bijak berkata, “tidak ada yang baru di bawah kolong langit”. Oleh sebab itu, pengaruh pemikiran sebelumnya pasti dapat terlihat dalam semua pemikiran. Jadi gagasan yang dihasilkan oleh seorang pemikir tidak mutlak dari dirinya, tapi terpengaruh oleh pemikiran sebelumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 192

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini oleh penulis diuraikan dalam lima bab yang antara satu dengan lainnya ada keterkaitan.

Bab *pertama*, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi wacana negara demokrasi di dunia Islam, yang meliputi wacana klasik dan Pertengahan, wacana modern, dan wacana kontemporer.

Bab *ketiga*, berbicara tentang Kuntowijoyo: riwayat hidup dan pemikiran transformatif Kuntowijoyo.

Bab *empat*, berbicara tentang Objektivikasi Islam dalam bingkai demokratisasi di Indonesia yang meliputi: epistemologi politik Kuntowijoyo, format hubungan agama dan negara, agama dan demokrasi, Pancasila sebagai objektivikasi Islam.

Bab *kelima*, penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang Kuntowijoyo yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Konsep-konsep yang ditawarkan Kuntowijoyo di antaranya adalah Ilmu Sosial Profetik dan Objektivikasi Islam. Ilmu Sosial Profetik adalah memuat kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan masyarakatnya dan tidak sekedar mengubah demi perubahan tapi mengubah berdasarkan cita-cita etik tertentu dan perubahan yang didasarkan pada cita-cita humanisasi/emansipasi, liberasi, dan transendensi, suatu cita-cita profetik yang doderivasikan dari misi historis Islam. Konsep lain yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo adalah Objektivikasi Islam. Objektivikasi adalah penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif.

Objektivikasi adalah perbuatan rasional-nilai (*wertrational*) yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional dan orang lain juga bisa merasakan tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Objektivikasi Islam tetap menganggap bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum dan akan menjadikannya terlebih dahulu sebagai hukum positif, yang perumusannya atas dasar persetujuan bersama warga negara. Jadi, syariat Islam tidak langsung menjadi hukum negara, tetapi melalui

objektifikasi. Syariat Islam kalau akan dijadikan sebagai hukum negara harus terlebih dahulu dipilih yang objektif, yang bisa berlaku untuk semua orang.

2. Bingkai Islam yang ditawarkan Kuntowijoyo tampak dalam pandangannya tentang objektifikasi Islam. Bentuk objektifikasi Islam ini terdapat dalam Pancasila. Walaupun tidak transparan, tapi dalam Pancasila ada ajaran tauhid dan tidak ada satupun ajaran Pancasila yang tidak sesuai dengan risalah Islam. Bingkai Islam tersebut tampak juga dalam pandangannya tentang demokrasi. Kuntowijoyo memberikan “ruh” terhadap substansi demokrasi dengan universalitas nilai-nilai Islam tentang musyawarah, silaturahmi, kerja sama, keadilan, dan perubahan. Dengan kata lain, Kuntowijoyo menguraikan format-format dan substansi demokrasi dengan tetap berpihak pada paradigma Al-Quran.

B. Saran-saran

Setelah ditelusuri pandangan Kuntowijoyo tentang bingkai Islam dalam demokrasisasi di Indonesia yang tertuang dalam sebuah karya ilmiah yang sederhana ini, maka penulis menyarankan:

1. Perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang persoalan yang setema atau tema-tema lainnya dari Pemikiran Kuntowijoyo karena skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga bisa jadi tidak objektif dalam

menilai Kuntowijoyo sendiri selaku pribadi yang memiliki keluasan keilmuan.

2. Walaupun di sana-sini banyak terjadi penolakan terhadap modal gagasan yang ditawarkan seperti pandangan-pandangan Kuntowijoyo tentang bingkai Islam dalam hubungannya dengan demokratisasi di Indonesia, namun hemat penulis, gagasan Kuntowijoyo ini paling tidak bisa menjadi jalan keluar dari ketegangan antara Islam dan orang-orang yang tidak setuju dengan ide-ide Negara Islam.
3. Sebagai pribadi yang tidak diragukan lagi kecakapan keilmuannya, Kuntowijoyo yang tergolong mempunyai pemikiran yang orisinil perlu diberi penghargaan dan didengar pendapat-pendapatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku

- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pusatak Pelajar, 1996
- Ahmad, H. Zainal Abidin, *Konsep Negara Bermoral menurut Imam Al-Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Al-Faruqi, Isma'il Raji', *Islamisasi Pengetahuan*, Bandung: Pustaka, 1984
- Al-Maududi, Abul A'la, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1990
- , *Hukum dan Konstruksi Sistem Politik Islam Abul A'la Al-Maududi*, terj. Asep Hikmah, Bandung: Mizan, 1995
- Al-Raziq, Ali Abd, *Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan*, terj. M. Zaid Su'di, Yogyakarta: Jendela, 2002
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. XI, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1998
- Armas, Adnin, *Pengaruh Kristen-Orientalis terhadap Islam Liberal: Dialog Interaktif dengan Aktivis Jaringan Islam Liberal*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- As-Syawii, Taufiq, *Syura Bukan Demokrasi*, terj. Jamaluddin ZS., Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Audi, Robert, *Agama dan Nalar Sekuler*, terj. YUSDANI dan Aden Wijdan Yogyakarta: UII Press dan PSI UII, 2002
- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996
- , *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. ix, Yogyakarta: Kanisius, 2005

- Khomisun, Bambang, *Pandangan Fazlur Rahman tentang Politik*, Yogyakarta: Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, 1996
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, A.E. Priyono (ed.), Bandung: Mizan, 1991
- , *Demokrasi dan Budaya Birokrasi*, cet. I, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994
- , *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995
- , *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan: 1997
- , "Menuju Negara Rasional", dalam Tim MAULA (ed.), *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal* Bandung: PUSTAKA HIDAYAH, 1999
- , *Muslim Tanpa Majid: Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, Bandung: Mizan, 2001
- , *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas*, Bandung: Mizan, 2002
- , *Metodologi Sejarah*, cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003
- , *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, & Etika*, cet. II, Bandung: Teraju, 2005
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufuran A. Masa'di, Jakarta: Rajawali Press, 1999
- Ma'arif, A. Syafi'i, *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante, Islam, dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3Es, 1985
- , *Islam dan Politik di Indonesia: Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: IAIN Kalijaga Press, 1988
- Madjid, Nurcholis, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987
- , "Agama dan Negara dalam Islam: Telaah atas Fiqh Siyasi Sunni", dalam Budy Munawar Rachman (ed), *Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Maliki, Zainuddin, *Agama Rakyat Agama Penguasa, Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2000

- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Mas'udi, Masdar F., "Telaah Kritis atas Teologi Mu'tazilah", dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Mill, John Stuart, "Mengenal Kebebasan", dalam Mochtar Lubis (Ed.), *Demorasi Klasik dan Modern*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994
- Mortimer, Edward, *Islam dan Kekuasaan*, terj. Enna Hadi dan Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1984
- Mudzar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998
- Mulkhan, Abdul Munir, *Kearifan Tradisional Agama Bagi Manusia atau Tuhan*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Muntoha, Fiqh Siyasah: *Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Adicita, 1998
- Muttakhidul, Fahmi, *Islam Trnsendental: Menelusuri jejak-jejak Pemikiran Kuntowijoyo*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Mustansyir, Rizal dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Muzakki, Akh, *Mengupas Pemikiran Agama dan Politik Amin Rias Sang Tokoh Reformasi*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-legal Atas Kontitusional 1956-1959*, terj. Sylvia Tiwon, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Brebagai Aspek*, Jilid I, Jakarta: UI Press, 1985
- , *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986
- Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafik, 1993
- Rais, M. Amien, "Sekularisme: Proyek Menjauhkan Agama", dalam *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998

- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, pent. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Rumadi, *Masyarakat Post Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokrasi Indonesia*, Bekasi: Gugus Press, 2002
- Sitompul, Agussalim, *Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI (1947-1997)*, Jakarta: Logos, 2002
- Santoso, Listiyono, *Teologi Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004
- Shimogaki, Kazuo, *Kiri Islam: Antara Modernisme dan Posmodernisme, Kajian Kritis Atas Pemikiran Hassan Hanafi*, pent. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula, Yogyakarta: LKIS, 1993
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993
- Smith, Donald Eugene, *Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis*, terj. Machnun Husain, Jakarta: CV. Rajawali, 1985
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996
- Sumantri, A.A, *Hari Ulang Tahun Partai Politik Islam Masyumi ke-XI*, Surabaya: Pimpinan Wilayah Masyumi Jatim, 1956
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Tehnik*, Bandung: Tarsito, 1987
- , *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990
- Suyuti, Mahmud, *Politik Toriqoh: Qodariyah dan Naqsabandiyah Jombang*, Yogyakarta: Galang Press, 2001
- Syamsuddin, M. Din, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Abu Zahra (ed), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Raligijs di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
- , *Islam dan Politik Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001
- Taimiyah, Ibnu, *Pedoman Islam Bernegara*, terj. KH. Firdaus A.N, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: PRENADA MEDIA, 2003

Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam, Pluralisme Budaya dan Politik: Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Kebersamaan dan Pendidikan*, Yogyakarta: SIPRESS, 1994

Watt, Montgomery, *Keagungan Islam*, terj. Hartono Hadikusumo, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990

Wachid, Abdurrahman, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: Grasindo, 1999

Wiryohandoyo, Sudarno, "Kata Pengantar", dalam Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002

B. Kelompok Jurnal, Majalah, Koran, dll.

Ali, Fachry, "Akomodasi Non-Politik Islam Indonesia dalam Struktur Orde Baru," dalam *Prisma*, No. 3, Tahun XX, Maret 1991

Aziz, Abdul, "Pemikiran Etika Politik Abdullah Ahmad An-Naim", dalam *RELIGI*, III, No. 2, Juli 2004

Azra, Azymardi, "Tradisionalisme Nasr: Eksposisi dan Refleksi, Laporan dari Seminar Seyyed Hossien Nasr", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 4, Vol. IV, Th. 1993

Hidayat, Komaruddin, "Pembaruan Islam: dari Dekonstruksi ke Rekonstruksi," dalam *Ulumul Qur'an*, Vol. 3, tahun 1995

Kuntowijoyo, "Ilmu Sosial Profetik: Etika Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial", dalam *Al-Jami'ah*, No.61/1998

-----, "Paradigma Baru Ilmu-ilmu Islam: Ilmu Sosial Profetik sebagai Gerakan Intelektual", dalam *Mukaddimah*, No. 7, Th. V/1999

-----, "Agenda Umat Islam", dalam *Republika*, Senin, 15 Mei, 2000

-----, "Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, Ideologi, dan Ilmu", dalam *Jurnal Media Inovasi*, Nomor 2th XI/2002

Nashir, Haedar, "Agama, Ideologi, dan Politik dalam Ketegangan Wacana", dalam *Jurnal Media Inovasi*, No. 1 Th. X/2000

Rahadjo, M. Dawam, "Assalamu'alaikum", dalam *Ulumul Qur'an*, 3/VII/97

Subhan, Arief, "Dr. Kuntowijoyo: Al-Qur'an sebagai Paradigma", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 4, Vol. V, th. 1994

Syamsuddin, M. Din, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, 4, No. 2, Tahun 1993



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CIRRICULUM VITAE

Nama : Alva Agus Widodo
Tempat/ tgl lahir : Yogyakarta, 08 Agustus 1980
Alamat : Pugeran, MJ II/226 RT 08/RW. 03 kel. Suryodiningratan
kec. Mantrijeron Yogyakarta 55141
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

Tingkat Dasar : SDN Suryodiningratan III, Mantrijeron, Yogyakarta
Tingkat SLTP : SMPN 16 Yogyakarta
Tingkat SLTA : SMUN 1 Sewon, Bantul, Yogyakarta
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Pondiman
Pekerjaan : Karyawan swasta
Nama Ibu : Rasiyem
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Pugeran, MJ II/226 RT 08/RW. 03 kel. Suryodiningratan
kec. Mantrijeron Yogyakarta 55141

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Tadarus RIMASKO (Remaja Islam Masjid Komaruddin) : Periode 2001-2002
2. Ketua RIMASKO : Periode 2002-2004
3. Bendahara FSRMY (Forum Silaturahmi Remaja Masjid Yogyakarta) : Periode 2004-2006

اللهم اني
أعوذ بك من الهم والحزن
وأعوذ بك من العجز والكسل
وأعوذ بك من الجبن والبخل
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال

*"Ya Allah aku berlindung kepada-Mu
dari kebimbangan dan keluh kesah kesedihan.
Dan aku berlindung dari kehinaan dan kemalasan.
Dan aku berlindung dari sikap bakhil dan kikir.
Dan aku berlindung dari belitan utang dan teror manusia."*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
NAN KALIJAGA
OGYAKARTA